**PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**Oleh:**

**Emirza Henderlan Harahap, SH, MH**

*Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan*

***Abstrak***

***Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Bimbingan dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan mendapat jumlah skor 326 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik dapat diketahui bahwa dari indikator Supervisi dengan 5 (lima) sub indikator yang diteliti yaitu dengan mengadakan pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, pengawasan terhadap kinerja aparat desa dan pengawasan terhadap tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Dengan sub indikator tersebut diperoleh tanggapan responden yang menyatakan baik berjumlah 141, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 142, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 22.***

### Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Supervisi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan mendapat jumlah skor 305 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.dapat diketahui bahwa 5 (lima) sub indikator yang diteliti dari indikator Konsultasi yaitu memberikan masukan-masukan, menerima keluhan-keluhan, memberikan penjelasan, menjalin komunikasi yang baik, memberikan solusi-solusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini memperoleh tanggapan dari responden yang menyatakan baik berjumlah 138, kemudian responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 166, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 11. Bedasarkan indikator Konsultasi dengan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Konsultasi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan mendapat jumlah skor 315 dan yang mana dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”. Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan hasil analis Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat diketahui bahwa 3 indikator yang diteliti yaitu Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi dengan 28 orang responden diperoleh tanggapan responden yang menyatakan baik dengan skor 459, kemudian responden yang menyatakan Cukup Baik skornya 440, dan yang menyatakan Kurang Baik skornya 47Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan jumlah skor rata-rata 315 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

***Kata Kunci: Peranan Camat, Dalam Membina Administrasi, Pemerintahan Desa***

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana tentram lahir dan batin serta dinamis. Dengan melihat hal tersebut, jelaslah bahwa pembangunan nasional merupakan perimbangan kewajiban antara pemerintah dan rakyat secara keseluruhan, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pembangunan dan masyarakat berkewajiban untuk menunjang dan berperan secara aktif dalam setiap gerak langkah pembangunan.

Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang di daerah khususnya maupun nasional pada umumnya.

Menurut Johan Galtung (dalam Trijono:2007) Pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Pembangunan juga dapat dilihat sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa.

* 1. **Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan terdapat beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi yakni antara lain:

1. Bagaimana Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Apa yang menjadi faktor penghambat camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
	1. **Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi tentang Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian maksud dari penelitian untuk mengetahui bagaimana peranan yang diberikan Camat dalam membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di bidang Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
	1. **Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari hasil pelaksanaan penelitian ini adalah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran bagi penulis dalam hal Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan bagi Kantor Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.
	1. **Kerangka Pemikiran**

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukaan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya Soekanto(2001:268).

Menurut Soekanto (2001: 269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian yaitu sebagai berikut:

* + 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
		2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
		3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat sosial.

Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparatur pemerintah pusat termasuk sumber daya manusia dalam tugasnya sebagai perumus kebijaksanaan nasional.

Menurut Riwu Kaho (2005:1) faktor pertama yang menentukan prospek otonomi daerah adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelengaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, apartur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas Pemerintahan Daerah diselenggarakan.

Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Administrasi Pemerintahan Desa

(Y)

Peranan Camat

(X)

* 1. **Metode Penelitian**
1. **Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, yang mana pada hasil penelitiannya lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.

1. **Populasi**

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jumlah populasi di kantor tersebut sebanyak 28 orang.

1. **Responden**

Berdasarkan Rumus Arikunto Suharsimi dimana jika Jumlah Populasi dalam lokasi penelitian tidak lebih dari 100 orang maka jumlah populasi tersebut harus diambil semua sebagai responden yang akan menerima angket dalam penelitian dan jika jumlah populasi di lokasi penelitian lebih dari 100 orang maka penulis dapat mengambil 25% - 50% dari jumlah populasi untuk dijadikan responden.

Dalam Penelitian ini penulis memiliki jumlah populasi sebanyak 28 orang maka setelah melihat rumus Arikunto diatas maka penulis mengambil semua populasi untuk dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 orang.

1. **Analisis Data**

Selanjutnya proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka dilaksanakan pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data dengan cara membaca, mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber seperti: wawancara, observasi, dokumen dan sebagainya.
2. Klasifikasi data: mengelompokkan data sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Reduksi data: memeriksa kelengkapan data untuk mencari kekurangan dan mengesampingkan yang tidak relevan.
4. Memeriksa keabsahan data.
5. Penarikan kesimpulan: merangkum uraian–uraian dalam susunan kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.
	1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

**1.7.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di amati. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

**1.7.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu tertentu. Adapun waktu penelitian ini ditetapkan kurang lebih tiga bulan yakni mulai bulan April 2019 sampai dengan Juli 2019.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Peranan**

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukaan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya Soekanto(2001:268).

Menurut Soekanto (2001: 269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian yaitu sebagai berikut:

* + 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
		2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
		3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat sosial.
1. **Pemerintahan**

Pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan Negara. Sedangkan Pemerintahan dalam arti sempit adalah meliputi seluruh kegiatan atau fungsi pelaksanaan undang- undang yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu presiden beserta jajarannya mulai dari menteri sampai tukang sapu kantor-kantor, mulai dari menteri sampai dengan juru penerang, mulai dari menteri sampai kepala desa (Salam, 2004;35).

1. **Kecamatan**

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Dalam penyelenggaran urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah pasal 126 ayat 1, 2, dan 3

1. **Pembinaan**

Menurut Ismail (2001;154). Mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima/pekerja dan penerima akhir (masyarakat). Dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik sejahtera dan sempurna.

Selanjutnya Saydam (2000;408) pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang diharapakan.

1. **Administrasi Pemerintahan Desa**

Menurut Widjaja (2002;19) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan Pemerintahan sendiri/otonom.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormatin dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Batang Angkola adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kecamatan ini adalah berada di Kelurahan Pintu Padang Raya I

Kecamatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan dan 30 (tiga puluh) desa. Luas Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan ini mencapai ± 473,02 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak ±32 ribu jiwa

**BAB IV PEMBAHASAN**

1. **Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**

Pembinaan organisasi bermaksud untuk mengembangkan individu- individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara keseluruhan. pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagai mana mestinya.

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dalam melakukan pekerjaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertantangan dengan pekerjaan maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa sebagai penggerak atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam mencapai berbagai keberhasilan pembangunan.

Camat secara umum memimpin penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintahan di desa maupun pemerintahan kelurahan, tugas pembangunan dan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan koordinasi atas instansi vertical. Sebagai pejabat Pembina pemerintahan desa seharusnya camat mempunyai program pembinaan supaya pembinaan yang dilakukan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan desa, agar pembinaan bisa berjalan dengan baik maka program pembinaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan.
2. Supervisi.
3. Konsultasi.
4. Pemberian pedoman.
5. Fasilitasi.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya yang memberikan pembinaan itu adalah camat dan stafnya sedangkan yang dibina itu adalan aparat pemerintahan desa. Adapun hasil penelitian penulis tentang peranan camat dalam membina administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan pada indikatornya yaitu:

1. **Bimbingan**

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal. Dengan adanya bimbingan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada serta bisa meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan agar tujuan bisa tercapai seperti yang diinginkan. Untuk melakukan bimbingan itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah:

1. **Memberikan Petunjuk**

Memberikan petunjuk dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap aparatur desa sangatlah perlu, karena masih banyaknya tugas-tugas yang belum mereka pahami dalam menertibkan administrasi pemerintahan desa Dapat diketahui bahwa 18 orang atau 64,30% menjawab “Ya” sedangkan responden menjawab “Kadang-Kadang” 5 orang atau 17,85% dalam adanya pemberian petunjuk guna kelancaran tugas-tugas yang dijalankan, dan 5 orang atau 17,85% menjawab “Tidak Ada” sehingga dapat diketahui bahwa Camat Batang Angkola Ada memberikan petunjuk kepada aparatur Desa dalam menjakankan Roda Pemerintahannya.

Tanggapan responden yang terbanyak adalah 18 orang atau 64,30% yang mana mayoritas mereka mengatakan bahwa ada petunjuk yang diberikan oleh pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan tugas yang belum mereka pahami.

Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan tugas pemerintah desa memang menjadi tugas pemerintah kecamatan yang mana petunjuk tidak hanya diberikan oleh camat melainkan semua staf yang ada dipemerintah kecamatan yang dianggap memahami permasalahan atau penyelenggaraan tugas pemerintah desa bisa melalui Sekcam ataupun Kepala Seksi yang ada.

1. **Memberikan Pengarahan**

Pengarahan sangat dibutuhkan oleh aparat desaterhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa karena dengan pengarahan bisa melaksanankan tugas lebih baik lagi. Tanggapan responden tentang langkah “Memberikan Pengarahan” Dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan dengan cara memberikan pengarahan kepada apatur pemerintahan Desa dalam melaksanakan roda pemerintahanya diketahui 22 responden atau 78,58% yang menjawab “Ya” sedangkan 5 responden atau 17,85% menjawab “Kadang-Kadang” dan 1 orang atau 3,57% yang menjawab “Tidak ada”.

Mayoritas responden menjawab Ya dengan frekuensi 22 orang atau 78,58% yang mana pemerintah kecamatan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap peenyelenggaraan tugas menurut Wawancara kepada Camat Batang Angkola pada hari Selasa 07/02/2012 jam 10.52 wib, “pengarahan-pengerahan pasti diberikan jika pemerintah desa kurang memahami dalam pelaksanaan tugasnya”.

1. **Adanya Pelatihan**

Pelatihan sangat menunjang kinerja dan prestasi kerja karena dengan pelatihan akan mendapatkan pendidikan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dipemerintahan desa untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan arti pentingnya penataan tertib administrasi desa tersebut. Kemudian tanggapan responden tentang langkah “Pemberian Pelatihan” yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Dapat diketahui bahwa 5 orang atau 17,85% menjawab “Ya” sedangkan responden yang menjawab “Kadang-Kadang” 20 orang atau 71,42% dan 3 orang atau 10,73% menjawab “Tidak Ada” sehingga dapat diketahui bahwa Camat Batang Angkola hanya kadang-kadang memberikan Pelatihan kepada aparatur Desa dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada.

Mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 20 orang atau 71,42%. Hanya kadang-kadang pelatihan yang mereka ikuti, padahal pelatihan bisa meningkatkan kualitas aparatur penyelenggaraan pemerintah karena dengan diadakannya pelatihan-pelatihan akan lebih meningkatkan pemahaman dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah itu bisa tercapai karena diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang handal.

1. **Adanya Rapat Kerja**

Dengan diadakan rapat kerja maka permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggaraan pemerintah desa bisa dikemukakan dan dipecahkan bersama-sama, dan bisa menunjang perbaikan kinerja aparat desa satu dengan yang lainnya. Adapun tanggapan responden terhadap adanya Rapat Kerja. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan dengan cara mengadakan rapat kerja bersama apatur pemerintahan Desa dalam melaksanakan roda pemerintahanya diketahui 10 responden atau 35,72% yang menjawab “Ya” sedangkan 16 responden atau 57,14% menjawab “Kadang-Kadang” dan 2 orang atau 7,14% yang menjawab “Tidak ada”.

Mayoritas responden menjawab kadang-kadang pemerintah kecamatan mengadakan rapat kerja. Sementara rapat kerja ini sangat memicu untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kinerja yang telah dilakukan selama ini bagi pemerintah desa.

Dengan mengadakan rapat kerja dan mengumpulkan aparat desa sebanarnya sangat membantu penyelenggaraan pemerintah desa, dimana dengan itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan, bisa saling bertukar pikiran dan menilai kinerja dari masing-masing desa agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.

1. **Melakukan Evaluasi**

Melakukan Evaluasi “Penilaian” terhadap kinerja pemerintah desa juga bisa meningkatkan semangat kerja, dengan adanya penilaian diharapkan membimbing agar termotivasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi. Kemudian tanggapan responden terhadap adanya Evaluasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan dengan cara melakukan Evaluasi terhadap kinerja apatur pemerintahan Desa dalam melaksanakan roda pemerintahanya diketahui 5 responden atau 17,8% yang menjawab “Ya” sedangkan 20 responden atau 71,4% menjawab “Kadang-Kadang” dan 3 orang atau 10,8% yang menjawab “Tidak ada”.

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap kepala desa evaluasi yang dilakukan pemerintah kecamatan mendapat jawaban 20 responden atau 71,4% yang menyatakan kadang-kadang . Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sekretaris Camat Batang Angkola pada hari Kamis, 03/06/2019 jam 10.27 wib, “bahwasannya pihak kecamatan telah melakukan evaluasi ketika akan dan setelah diadakannya alokasi untuk desa”. Dengan diadakanya evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa ini sebanarnya bisa lebih meningkatkan kegairahan dan semangat kerja perangkat desa, dengan adanya penilaian tersebut akan menimbulkan keinginan untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya karena adanya penilaian terhadap sebuah pekerjaan tersebut.

1. **Supervisi**

Untuk tercapainya efektifitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diadakan suatu tindakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang akan mengawasi jalannya administrasi yang akan diberikan oleh pemerintahan kepada para aparaturnya.

Dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dikenal adanya pengawasan umum, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing staf. Adapun sub indikator dari supevisi yang dilakukan terhadap adminisrtasi pemerintahan desa dapat dilihat pada penilaian sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang dilakukan langsung oleh atasan memengang sangat membawa pengaruh tehadap kinerja bawahan, dengan adanya pengawasan langsung bisa meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang ada. Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden terhadap hasil Pengawasan Langsung yang dilakukan camat terhadap Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diketahui bahwa Supervisi yang dilakukan oleh camat Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara Pengawasan Langsung ketempat kerja dalam rangka untuk meninjau kinerja pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 8 orang atau (28,5%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 15 orang atau (53,8%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 5 orang (18%). Dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap Pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak Kecamatan mendapat jawaban kadang- kadang sebanyak 15 orang atau (53,8%) . Menurut Wawancara yang dilakukan oleh peneliti Kepala Desa Huta Padang (Selasa 14/02/2012;09.25) dan Aek Nauli (Kamis 09/02/2012;10.05) “menyatakan bahwa pemerintah kecamatan masih terkesan jarang dalam melakukan pengawasan langsung turun kedesa dalam rangka pengawasan terhadap tertib administrasi desa. Pada hal pengawasan langsung ini sangat bermamfaat dan bisa meningkatkat kinerja pemerintahan desa dalam menata administrasi pemerintahan”.

Pengawasan langsung sangat menunjang pelaksanaan tugas aparat desa karena peranan seorang atasan sangatlah dipatuhi oleh bawahan, sehingga dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan sangat menentukan dan menjadikan sebuah pekaerjaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Karena peran pemimpin sangatlah kuat dalam penyelenggaraan pemerintah menuju terwujudnya tujuan otonomi.

1. Pengawasan Tidak Langsung

Kemudian tanggapan responden tentang supervise dengan melakukan Pengawasan tidak langsung dengan memintai laporan tentang kondisi penduduk dan kinerja Pemerintahan Desa pada tabel berikut ini menjelaskan tanggapan responden tentang Supervisi yang dilakukan oleh Camat dengan Pengawasan Tidak Langsung dengan meminta laporan diketahui bahwa 10 orang responden atau (35,7%) yang menjawab “Ya”, 15 orang atau (53,5%) yang menjawab “Kadang-kadang” dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 3 orang atau (10,8%).

Pengawasan tidak langsung juga bisa membantu tertib penataan administrasi desa, yang mana dengan pengawasan tidak langsung pihak kecamatan bisa mengetahui perkembangan-perkembangan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Sejauh ini untuk Pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan kependudukan setiap bulannya sudah dilaksanakan oleh pihak kecamatan, dimana setiap desa harus menyerahkan laporan kependudukannya kepada pihak kecamatan. bedasarkan Wawancara kepada Sekcam Batang Angkola pada hari Kamis 03/06/2019 jam 10.27 “ia mengatakan bahwa jika Pemerintah Desa tidak menyerahkan laporan kependudukannya maka pihak kecamatan akan menyurati agar menyerahkan laporan kependudukannya”.

1. Pengawasan terhadap Kepala Desa

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap kinerja kepala desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diketahui bahwa Supervisi yang dilakukan oleh camat Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara Pengawasan Langsung ketempat kerja dalam rangka untuk meninjau kinerja pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 10 orang atau (35,7%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 15 orang atau (53,5%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 3 orang (10,8%).

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap kepala desa meyoritas mendapat jawaban kadang-kadang sebanyak 15 orang atau (53,5%). Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti Kepala Desa Hurase pada hari Senin 24/06/2019 jam 09.45 wib “mengatakan bahwa sejauh ini pihak kecamatan hanya meminta laporan kependudukan setiap bulannya. Sementara untuk laporan harian kerja kepala desa tidak pernah diminta untuk melaporkan dan sejauh ini oleh camat padahal dengan itu bisa membantu camat untuk mengetahui kinerja Kepala Desa”.

Dengan meminta laporan harian kerja sebenarnya sudah sedikit membantu pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, karena sedikit banyaknya bisa mengetahui bagainama kinerja kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa.

1. Pengawasan Terhadap Aparatur Desa

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai Pengawasan terhadap aparatur yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diketahui bahwa Supervisi yang dilakukan oleh Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan sub indikator melakukan pengawasan terhadap aparatur desa ketempat kerja dalam rangka untuk meninjau kinerja pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 9 orang atau (32,2%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 12 orang atau (42,8%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 7 orang (25,0%).

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap kepala desa mendapat jawaban kadang-kadang dengan sebanyak 12 orang atau (42,8%). Menurut Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala Desa Hurase hari Senin 24/06/2019 jam 10.29 wib, “bahwasannya pihak kecamatan masih jarang turun kedesa-desa untuk melihat bagaimana perkembangan aparat penyelenggaraan pemerintahan desa padahal jika melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa mereka pasti akan bekerja lebih baik lagi, dengan adanya pengawasan sebenarnya bisa meningkatkan kualitas kerja seseorang dan membangkitkan semangat kerja”.

Pada dasarnya Pengawasan terhadap aparat desa sangatlah perlu dilakukan karena Aparat desa merupakan subjek penggerak dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan sumber daya manusia haruslah baik, dalam pengertian moral dan kapasitasnya karena keberhasilan pencapaian tujuan tidak terlepas dari kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya.

1. Melakukan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap pemerintahan desa dapat diketahui bahwa pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh camat Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka untuk meninjau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diketahui tanggapan responden bahwa yang menyatakan “Ya” sebanyak 10 orang atau (35,7%), dan yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 14 orang atau (50,0%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 4 orang (14,3%).

Berdasarkan uraian tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa mayotanggapan responden menjawab pengawasan terhadap tertibadministrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh pihak Kecamatan mendapat jawaban kadang-kadang yaitu sebanyak 14 orang atau (50,0%).

Administrasi di pemerintahan desa sangatlah vital dimana segala urusan surat menyurat, tanah, jual beli dan system prosedur dilaksanakan disana. Pengawasan sangatlah dibutuhkan dalam penertiban administrasi pemerintahan desa karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat data yang terkandung didesa tidak hanya berguna bagi pembangunan desa tetapi bagi pembangunan bangsa dan menjadi tolak ukur untuk meratakan pembangunan desa karena desa merupakan integral dari pembangunan bangsa.

**3. Konsultasi**

Konsultasi merupakan sebuah pertemuan/konvarensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Dengan adanya konsultasi pemerintah desa bisa mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya komunikasi yang baik maka proses konsultasi ini tidak akan sulit dilaksanakan.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai konsultasi dapat dinilai melalui sub indikator yang akan dijelaskan berikut ini.

a. **Pemberian Masukan**

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai pemberian masukan terhadap aparatur pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diketahui bahwa pemberian masukan yang dilakukan oleh pihak kecamatan kepada aparatur desa agar bisa memahami dengan baik tugas-tugas yang diberikan dalam menjalankan administrasi pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 10 orang atau (35,7%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 16 orang atau (57,1%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 2 orang atau (7,2%).

Dapat diketahui mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 16 orang atau (57,1%), bedasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Hurase pada hari Senin 25/06/2019 jam 09.25 wib untuk sub indikator konsultasi ini, “ia menyatakan bahwa terkadang masih sulitnya untuk bertemu dengan camat karena masing-masing antara camat dan kepala desa mempunyai kesibukan tersendiri dalam pekerjaannya”.

**b. Menerima Keluhan**

Kemudian tanggapan responden tentang penilaian “Menerima Keluhan” dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Menerima Keluhan dari pemerintahan Desa jika ada kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 9 orang atau (32,1%), yang menyatakan “Kadang- kadang” sebanyak 17 orang atau (60,7%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 2 orang atau (7,2%).

**c. Memberikan Penjelasan**

Selanjutnya sub indikator dari konsultasi yaitu berupa memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kesulitan kerja yang dihadapi pemerintah desa. tanggapan responden tentang “Memberikan Penjelasan” maka dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Memberikan Penjelasan Kepada pemerintahan Desa jika ada tugas-tugas yang belum mereka pahami dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 7 orang atau (25%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 18 orang atau (64,2%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 3 orang atau (10,8%).

Bedasarkan hasil dari tanggapan responden tersebut diketahui bahwa mayoritas responden menjawab Kadang-kadang yaitu sebanyak sebanyak 18 orang atau (64,2%).

Memberikan penjelasan-penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa merupakan tugas yang melekat bagi pihak kecamatan dimana masik banyak aparat desa yang belum memahami pelaksanaan tugasnya dengan jelas. Penjelasan diharapkan bisa mengurangi angka kesalahan dapal pelaksanaan tusas pemerintah desa.

**d. Menjalin Komunikasi**

Kemudian tanggapan responden tentang penilaian “Menjalin komunikasi” dapat diketahui bahwa camat dalam menjalin komunikasi dengan pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 12 orang atau (42,8%), yang menyatakan “Kadang-kadang” sebanyak 15 orang atau (53,6%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 1 orang atau (3,6%).

**e. Memberikan Solusi**

Kemudian tanggapan responden tentang penilaian “Pemberian solusi” dapat diketahui bahwa pihak kecamatan dalam Menerima Keluhan dari pemerintahan Desa jika ada kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemerintahannya diketahui tanggapan responden yang menyatakan “Ya” sebanyak 8 orang atau (28,6%), yang menyatakan “Kadang- kadang” sebanyak 17 orang atau (60,7%) dan yang menyatakan “Tidak Ada” sebanyak 3 orang atau (10,7%).

Maka dapat diketahui mayoritas responden menjawab kadang-kadang yaitu sebanyak 17 orang atau (60,7%). Karena masih ada yang beranggapan sulitnya untuk bertemu dengan camat untuk berkonsultasi.

1. **Rekapitulasi jawaban responden Dalam Setiap Indikator Variabel**

Bedasarkan tanggapan responden tentang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan bedasarkan masing– masing indikator dapat diketahui bahwa dari indikator Bimbingan dalam Pembinaan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa dengan 5 (lima) sub indikator mendapat tanggapan responden yang telah ditetapkan bahwa yang menyatakan baik berjumlah 180, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 132, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 14.

Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Bimbingan dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan mendapat jumlah skor 326 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik dapat diketahui bahwa dari indikator Supervisi dengan 5 (lima) sub indikator yang diteliti yaitu dengan mengadakan pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, pengawasan terhadap kinerja aparat desa dan pengawasan terhadap tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Dengan sub indikator tersebut diperoleh tanggapan responden yang menyatakan baik berjumlah 141, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 142, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 22.

### Bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Supervisi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan mendapat jumlah skor 305 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.dapat diketahui bahwa 5 (lima) sub indikator yang diteliti dari indikator Konsultasi yaitu memberikan masukan-masukan, menerima keluhan-keluhan, memberikan penjelasan, menjalin komunikasi yang baik, memberikan solusi-solusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini memperoleh tanggapan dari responden yang menyatakan baik berjumlah 138, kemudian responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 166, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 11.

Bedasarkan indikator Konsultasi dengan penjumlahan dari 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator Konsultasi dalam Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan mendapat jumlah skor 315 dan yang mana dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan hasil analis Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat diketahui bahwa 3 indikator yang diteliti yaitu Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi dengan 28 orang responden diperoleh tanggapan responden yang menyatakan baik dengan skor 459, kemudian responden yang menyatakan Cukup Baik skornya 440, dan yang menyatakan Kurang Baik skornya 47.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan jumlah skor rata-rata 315 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### Kesimpulan

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

* + 1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah pada pasal 224 ayat (1) berbunyi: Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
		2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepala desa untuk mencapai tujuannya itu pemerintah desa mampu mengerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
		3. Dari hasil penelitian dapat diketahui Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa belum maksimal menurut tanggapan responden, ini dapat diketahui beberapa tabel dalam bab V.
1. **Saran**

Ada beberapa ditemukan hal-hal penting agar pembinaan lebih baik lagi. Untuk itu peneliti mengajukan beberapa saran barikut:

1. Sebaiknya lebih sering mengadakan Rapat kerja agar bisa mengetahui lebih jauh kinerja apataur desa dan memberikan bimbingan/pelatihan seharusnya mempunyai perencanaan yang matang dan memerhatikan pelatihan yang dibutuhkan oleh Pemerintahan Desa.
2. Sebaiknya lebih sering datang kekantor desa untuk melakukan pengawasan dan tinjauan-tinjauan kedesa-desa sehingga program pembinaan yang pernah diberikan bermamfaat, berjalan lancar dan penataan administrasi desa bisa tertib.
3. Menjalin komunikasi yang Baik agar jika ada kesulitan kerja Pemerintah Desa bisa langsung berkonsultasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Ismail, Maimunah. 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Jakarta; Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Indonesia.

Kusnadi. 2005. *Pengantar Menajemen.* Malang; Unibraw Press.

Kansil, C. ST. 2004. *Pemerintahan Daerah Diindonesia.* Jakarta; Sinar Grafika. Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa.* Jakarta; Rineka Cipta.

------------------------. 2001. *Dimensi-dimensi Pemerintahan daerah*, Jakarta; Rineka Cipta.

------------------------. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru).* Jakarta; Rineka Cipta.

Nurholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta; Bumi Aksara.

Riwu. Kaho Josef. 2005, *Prosfek Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Salam, Dharma Satyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia.* Jakarta; Djambatan, Edisi Revisi.

Saydam, Gozali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Alam.* Jakarta; Djambatan. Sedarmaryati. 2004, *good Governance (Pemerintahan yang baik).* Bandung;

Singarimbu, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta; LP3S

Soekanto, Soeryono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Sugiono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung; Alfabeta.

Syafie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Bandung; PT. Refika Aditama.

Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian.* DKI Jakarta; Buku Obor.

Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan birokrasi pemerintahan*. Yokyakarta; Graha Ilmu.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa.* Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

------------------. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa.* Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

------------------. 2005. *Penyelemggaraan Otonomi di Indonesia.* Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

------------------. 2002. *Otonomi daerah dan daerah otonom.* Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

## Peraturan Perundang-undangan

* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan